

PERAN AMERIKA SERIKAT DALAM MEMPERKUAT KEAMANAN MARITIM INDONESIA TAHUN 2009-2019

THE UNITED STATES ROLE IN BOLSTERING INDONESIAN MARITIME STRUCTURE FROM 2009 - 2019

Michelle Vicky Gunawan
Universitas Pelita Harapan, Tangerang
e-mail: michellevicky30@gmail.com

Abstrak

Keamanan maritim merupakan salah satu isu yang dianggap penting oleh Amerika Serikat. Peranan Amerika Serikat dalam sektor maritim merupakan salah satu upaya pemenuhan kepentingan nasional negara. Hal tersebut mendorong Amerika Serikat menjalin kerja sama dengan negara yang memiliki kondisi geopolitik strategis seperti Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai kepentingan Amerika Serikat dalam sektor keamanan maritim Indonesia, peran Amerika Serikat dalam sektor keamanan maritim Indonesia dan pertimbangan Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat. Tujuan penelitian ini adalah memberikan perbandingan peran Amerika Serikat dalam sektor kemaritiman Indonesia di periode Susilo Bambang Yudhoyono II dan Joko Widodo I. Teori neoclassical-realism dan neo-realism menjelaskan bahwa Hubungan Internasional dapat terjadi karena dorongan kepentingan nasional. Sesuai dengan kenyataan, Indonesia juga memiliki kepentingan dalam kerja sama tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta metode deskriptif dan komparatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan penelusuran daring. Terdapat tiga hasil analisis dalam penelitian ini yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibuat oleh penulis. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan adanya peningkatan peran Amerika Serikat dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia tahun 2009-2019 setelah adanya kebijakan Global Maritime Fulcrum. Peningkatan ini diwadahi oleh dan dilandasi tujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing pihak terkait.

Kata Kunci: Keamanan Maritim, Kepentingan Nasional, Amerika Serikat, Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo.

Abstract

Maritime security is an issue that is considered important by the United States. The role of the United States in the maritime sector is driven by its national interest. This encourages the United States to work with countries that have strategic geopolitical conditions such as Indonesia. This thesis aims to discuss the interests of the United States in Indonesia's maritime security sector, the role of the United States in the Indonesian maritime security sector, and Indonesia's considerations in establishing cooperation with the United States. The purpose of this thesis is to provide a comparison of the role of the United States in the Indonesian maritime sector in the period of Susilo Bambang Yudhoyono II and Joko Widodo I. Following the theory of neoclassical-realism and neo-realism International Relations is the product of states' national interest and this includes Indonesian interest in cooperation. This research uses a qualitative approach and descriptive and comparative methods with data collection techniques through literature study and online search. The thesis finds an increase in the role of the United States in strengthening Indonesia's maritime security in 2009-2019 after the presence of the Global Maritime Fulcrum policy. This increase is accommodated by and is based on the pursuit of the national interests of each party.

Keywords: Maritime Security, National Interest, United States, Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo.

Latar Belakang

Sebagai negara berdaulat, isu kemaritiman saat ini menjadi perdebatan hangat, terlebih jika menyangkut keamanan dan ketahanan sebuah negara. Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2017). Berdasarkan fakta ini, Indonesia adalah negara maritim yang didominasi oleh wilayah perairan. Indonesia telah dianugerahi dengan potensi yang besar pada wilayah perairannya. Sudah tidak asing bagi telinga kita mendengar ungkapan ‘nenek moyangku seorang pelaut’. Berdasarkan fakta sejarah, bangsa Indonesia memang pernah berjaya dalam kemaritiman. Indonesia memiliki posisi strategis di dalam jalur perdagangan dunia, 90% dari jalur perdagangan dunia diangkut melalui laut dan 40% dari perdagangan tersebut melewati Indonesia (Biro Komunikasi dan Informasi Publik. *Empat Puluh*, 2018). Salah satu jalur perdagangan dunia tersebut adalah selat Malaka sebagai jalur utama lalu lintas barang dan penumpang antara wilayah Indo-Eropa dan wilayah lainnya di Asia serta Australia (Gerke & Evers, 2011). Sayangnya, dengan kekayaan dan potensi yang melimpah serta letak geografis yang strategis, negara yang di dominasi oleh wilayah laut ini justru bertindak seperti ‘buta laut’.

Prestasi Indonesia di kancah internasional pada era Susilo Bambang Yudhoyono memang sangat gemilang dengan ditetapkan politik luar negeri ‘*million friends and zero enemy*’. Sangat disayangkan bahwa pada kepemimpinan sebelumnya, orientasi kebijakan luar negeri Indonesia malah mengabaikan kekuatan yang dimiliki. Indonesia baru menyadari kekuatan yang dimilikinya di era kepemimpinan Joko Widodo setelah kurang lebih 69 tahun merdeka.

Pengambilan keputusan mengenai arah politik luar negeri merupakan respon terhadap berbagai isu yang terjadi di regional maupun internasional serta mencerminkan keadaan domestik dari sebuah negara. Politik luar negeri suatu negara akan mempengaruhi dinamika yang terjadi pada kawasan (*regional*), bahkan pada dunia. Perumusan arah politik luar negeri Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 merupakan respon terhadap isu yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia seperti ‘dibangunkan’ dengan adanya isu Laut Cina Selatan yang mencuat pada tahun 2013.

Walaupun semangat penguatan sektor keamanan maritim menjadi fokus dari politik luar negeri Indonesia di era Joko Widodo I, masih terdapat beberapa kelemahan yang menghambat penguatan keamanan maritim Indonesia, seperti: kurangnya sumber daya manusia dalam menjaga perbatasan laut Indonesia; tumpang tindihnya regulasi mengenai keamanan maritim Indonesia; minimnya teknologi canggih untuk memantau perairan dan perbatasan Indonesia; dan masih kurangnya lembaga yang berfokus pada kajian keamanan maritim untuk memberikan referensi bagi penguatan keamanan maritim Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan politik luar negeri, Joko Widodo memerlukan bantuan eksternal untuk meningkatkan keamanan pada sektor kemaritiman Indonesia. Salah satu negara yang memiliki konsentrasi penuh terhadap keamanan maritimnya adalah Amerika Serikat. *U.S Marine Corps, Navy*, dan *Coast Guard* dibentuk sebagai komponen yang berada di bawah departemen pertahanan negara Amerika Serikat (*U.S Department of Defense*).

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menganggap isu ini penting untuk dikaji karena Indonesia baru memberikan fokus terhadap potensi wilayah perairannya dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan terjadinya perubahan

politik dan dinamika global, Indonesia perlu menentukan arah politik luar negerinya. Terlebih dengan adanya masalah yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, maka kerja sama untuk memajukan bidang kemaritiman sangat diperlukan. Kerja sama pada sektor kemaritiman yang dilakukan haruslah dengan negara yang memiliki fokus dan tujuan yang sama. Untuk itu penelitian ini akan berjudul “Peran Amerika Serikat dalam Memperkuat Keamanan Maritim Indonesia Tahun 2009-2019”.

Keentingan Amerika Serikat terhadap Perkembangan Keamanan Maritim Asia Tenggara

John F. Bradford menjelaskan mengenai kepentingan dalam strategi yang diampu oleh Amerika Serikat pada bidang kemaritiman. Pada tahun 2007, Amerika Serikat mengusung strategi maritim terbarunya yang bernama ‘*A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower*’ yang disingkat menjadi CS21. CS21 menyebutkan bahwa kekuatan maritim Amerika Serikat difokuskan untuk menghalangi potensi musuh dan para pesaingnya. Selanjutnya, pada bulan Juni 2010 Menteri Pertahanan Robert Gates menyampaikan pidatonya pada acara *Shangri-La Dialogue*, ia memberikan gambaran tentang bagaimana Amerika Serikat melihat posisi strategis di Asia sebagai prioritas pertahanan Amerika Serikat yang lebih luas. Pada tahun 2011, Cina menyatakan bahwa Laut Cina Selatan merupakan wilayah teritorinya. Sama halnya dengan Cina, Amerika Serikat memiliki kepentingan terhadap Laut Cina Selatan. Karena sebagai negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar, kedua negara tersebut harus berbagi kepentingan yang sama dalam sektor kemaritiman yaitu jalur dagang yang aman untuk dilewati (Bradford, 2011).

Sedangkan, Andrew Scobell menjelaskan mengenai *Security Dilemma* di antara Amerika Serikat dan Cina khususnya

pada kawasan Asia Tenggara karena kepentingan nasional yang mereka miliki. Setelah klaim Cina pada Laut Cina Selatan, posisi geopolitik dari Asia-Pasifik ini sendiri dianggap penting oleh Amerika Serikat. Oleh karena posisi maritim Asia-Pasifik juga dianggap penting, pada tahun 2015 *U.S. Department of Defense* mengusulkan pembentukan *Asia-Pacific Maritime Security Strategy*, yang memiliki fokus utama pada wilayah Laut Cina Selatan. Strategi ini diusung karena Amerika Serikat lebih banyak melakukan perdagangan dengan negara-negara di Asia dibandingkan dengan Eropa. Hal ini juga menyebabkan jalur perdagangan yang melewati Samudra Pasifik dianggap penting untuk dipertahankan (Scobell, 2018).

Berbeda dengan paparan yang disampaikan oleh Carlyle A. Thayer. Dalam jurnalnya, ia membahas bahwa prioritas kebijakan Amerika Serikat mulai bergeser ke Asia Tenggara semenjak kepemimpinan Obama, terutama dengan negara Indonesia. Menteri Luar Negeri Clinton, memperjelas posisi Amerika Serikat yang mendukung kebebasan navigasi kepada awak media. Ia menyatakan kepentingan Amerika Serikat dalam pernyataannya tersebut yaitu Amerika Serikat memiliki kepentingan dalam kebebasan navigasi, akses yang terbuka di laut Asia, dan akan selalu menghormati hukum internasional di Laut Cina Selatan (Thayer, 2011).

Sedangkan, William T. Tow memaparkan bahwa hubungan Amerika Serikat dan Asia Tenggara dalam masa penyeimbangan semenjak terpilihnya Obama sebagai presiden. Strategi ‘*pivot*’ atau strategi penyeimbangan yang dilakukan Amerika Serikat menjadi kebijakan yang diusung Obama semasa jabatannya. Strategi ini dilakukan untuk melakukan penyeimbangan terhadap pertumbuhan Cina di kawasan Asia (Tow, 2016). Sheldon W. Simon juga menambahkan bahwa strategi ‘*pivot*’ atau *rebalance* yang dilakukan Amerika Serikat

tercermin dalam pernyataannya mengenai kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat bekerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara yaitu negara Thailand, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Vietnam, Filipina dan Singapura. Kekuatan militer Amerika Serikat dapat dilihat di kawasan Asia-Pasifik. Pada tahun 2020, Angkatan Laut Amerika Serikat akan memberikan 60% personil nya ke kawasan Pasifik. Amerika Serikat juga memberikan bantuan bagi negara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam mengamankan Selat Malaka. Pada permasalahan yang terjadi di Laut Cina Selatan, Amerika Serikat menyatakan tidak akan mendukung klaim negara mana pun. Namun, pada masa kepemimpinan Obama, Amerika Serikat mendukung ASEAN untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan hukum UNCLOS yang berlaku. Dengan kebangkitan kekuatan maritim yang dimiliki oleh Cina saat ini, kekuatan Amerika Serikat di Asia Tenggara terancam (Simon, 2015).

Phuong Nguyen menerangkan, bahwa kehadiran Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara bukan hanya sekedar penyeimbangan, melainkan untuk mempertahankan kekuasaan superiornya di udara dan perairan di area Pasifik. Pemikiran mengenai strategi ini dikaji berdasarkan bukti yang dikumpulkan oleh Amerika Serikat untuk mempertahankan superioritasnya yang disebut sebagai *Quadrennial Defense Review* (QDR) (Nguyen, 2016). Menurut Satu P. Limaye dalam artikelnya, Amerika Serikat juga menganggap serius status kawasan Asia Tenggara dalam masa penyeimbangan. Hal ini dikarenakan, ASEAN dianggap sebagai titik tumpu arsitektur bagi kawasan (Limaye, 2013).

Pertimbangan Indonesia dalam Menerima Bantuan Maritim Amerika Serikat

Salah satu kepentingan nasional dalam menjalin kerja sama adalah pertimbangan

mengenai posisi politik yang didapatkan sebagai hasil kerja sama tersebut. Euan Graham mengatakan bahwa negara-negara Asia Tenggara mendukung atau bertoleransi dengan kehadiran Amerika Serikat di Asia Tenggara karena mereka percaya akan adanya distribusi keuntungan. Namun, bagi Indonesia sendiri, kepedulian Amerika Serikat dalam sengketa Laut Cina Selatan bukan berarti Amerika Serikat dan sekutu akan mendapatkan akses bebas untuk menyebrangi wilayah Indonesia. Indonesia juga menaikkan perhatiannya kepada strategi ini karena terlalu banyak militer yang terlibat di dalamnya (Graham, 2013).

Berbeda dengan Donald E. Weatherbee yang menerangkan salah satu negara yang bekerja sama dengan Indonesia setelah adanya kebijakan Poros Maritim Dunia adalah Amerika Serikat. Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia dijelaskan sebagai strategi *hedging*. Dengan matinya *Trans-Pacific Partnership* dan kepemimpinan Amerika Serikat di bawah Donald Trump, membuat sinyal yang tak menentu di kawasan Asia-Pasifik yang dapat mengganggu kestabilan kawasan, termasuk terhadap Indonesia (Weatherbee, 2017). Evi Fitriani menambahkan bahwa, kehadiran Amerika Serikat di Asia Tenggara dapat menekan dominasi Republik Rakyat Tiongkok. Strategi U.S 'pivot' di Asia harus menjadi pusat perhatian bagi Amerika Serikat karena adanya penurunan kekuasaan yang dimiliki oleh Amerika Serikat di kawasan Asia. Di lain sisi, jika Amerika Serikat mengurangi keterlibatannya dalam sektor keamanan di Asia Tenggara, maka dominasi Republik Rakyat Tiongkok akan meluas tanpa batas. Dengan adanya kehadiran Amerika Serikat di kawasan memungkinkan Indonesia menerapkan strategi *hedging* yang dapat memperkuat posisi maritim Indonesia pada kawasan seiring dengan adanya kebijakan Poros Maritim Dunia (Fitriani, 2017).

Peran Amerika Serikat terhadap Perkembangan Keamanan Maritim Asia Tenggara

Sean Quirk dan John Bradford memaparkan kerja sama bilateral yang dilakukan Amerika Serikat dan Indonesia pada sektor maritim. Kerja sama tersebut berupa pelatihan TNI-AL Indonesia yang dilakukan dengan U.S. Navy yang dinamakan *Coordinated Afloat Readiness and Training* (CARAT). Departemen Pertahanan Amerika Serikat memberikan pelatihan gabungan antara U.S Navy dan TNI-AL yang dapat membantu Indonesia untuk menjaga keamanan negara (Quirk & Bradford, 2015). Namun, menurut Satu P. Limaye kerja sama yang dilakukan oleh Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara hanya berfokus terhadap tiga negara saja yaitu Thailand, Filipina dan Singapura. Ketiga negara tersebut disebut sebagai “*three core principles*” oleh Amerika Serikat (Limaye, 2013).

John F. Bradford juga menjelaskan bahwa Amerika Serikat terlibat aktif dalam memberikan pelatihan maritim karena melihat pentingnya perdagangan antara Asia bagi Amerika Serikat. Ancaman yang muncul terhadap keamanan jalur laut Indo-Pasifik membuat Amerika Serikat memperbaharui komitmennya terhadap kemaritiman di Asia. Untuk memperkuat kerja sama maritim Indo-Pasifik, Amerika Serikat membuat beberapa kerja sama diantaranya *Global Maritime Partnership, Senior Leader Engagement, Navy and Fleet Staff Talks, Ship Visits and Fleet Reviews, Humanitarian Missions, Training and Technology Transfers* dan *Training and Exercises*. Ia menambahkan bahwa pada tahun 2010, Amerika Serikat memberikan pelatihan maritim terbesar di dunia, yang dikenal dengan nama *Rim of the Pacific 2010* (RIMPAC 2010). Pelatihan tersebut memberikan pelatihan tentang pendaratan amfibi yang diikuti oleh Indonesia dan Malaysia. Pelatihan lainnya yaitu COBRA 2010 diberikan dan difasilitasi oleh Amerika

Serikat (Bradford, 2011). Bantuan Amerika Serikat dalam sektor kemaritiman Indonesia tidak hanya berupa bantuan pelatihan, dalam artikel yang ditulis oleh Ann Marie Murphy juga mengatakan bahwa pada era Obama-SBY (II), Amerika Serikat memberikan bantuan dana sebesar \$56 juta dolar kepada Indonesia untuk meningkatkan keamanan pesisir dan sistem radar kapal (Murphy, 2010).

Realisme

Realisme memandang hubungan internasional sebagai kompetisi perebutan kekuasaan di antara negara-negara yang berdaulat. Terdapat empat asumsi dari realisme. Asumsi yang pertama yaitu realisme memandang negara sebagai aktor utama yang paling penting dan dominan (Viotti & Kauppi, 1999). Kenneth Waltz pertama kali memperkenalkan perspektif neo-realisme dalam tulisannya *Man, the State and War* pada tahun 1959. Dalam perspektif ini terdapat dua inti utama yang saling berinteraksi yaitu: struktur anarki dan keinginan negara untuk selamat (Lundborg, 2019). Neo-realisme tetap menerima ajaran teori realis klasik, namun mempersempit fokus realisme dan konsepsinya tentang teori untuk menyajikan bukti formal untuk negara dalam mencari kekuasaan (Kolodziej, 2005).

Dinamika hubungan internasional yang terus berubah membuat kaum realis berupaya untuk mengimbangi kenyataan ini, sambil terus menyatakan relevansi konsep inti mereka sebagai abadi dan benar (Hutchings, 1991). Pada akhirnya, pandangan konsep realis klasik dan neo-realis digabungkan untuk menjelaskan bagaimana hubungan internasional terjadi yang disebut sebagai *neoclassical realists*. Berangkat dari teori realis klasik, Randall Schweller mengatakan bahwa pentingnya konsep *balance of power* dalam tatanan hirarki dunia internasional, seraya mengakui keberadaan pengaruh faktor domestik terhadap perilaku hubungan antar negara (Viotti & Kauppi, 2012).

Dengan kata lain, perspektif ini menjelaskan bahwa kepentingan nasional yang menjadi faktor penggerak terjadinya hubungan antar negara dapat terwujud dalam penggunaan konsep *balance of power*. Penelitian ini menggunakan teori *neoclassical-realist* dan *neo-realist* untuk memahami dinamika kerja sama maritim. Salah satu kepentingan nasional dalam kerja sama adalah untuk meningkatkan kapabilitas negara. Kerja sama dengan lawan atau kawan dipandang hanya bersifat sementara dan tergantung pada keadaan dan kebutuhan domestik negara yang terus berubah.

Kepentingan Nasional

Menurut Hans J. Morgenthau, pengertian dari kepentingan nasional adalah bertahan hidup, melindungi identitas fisik, politik, dan budaya dari perambahan oleh negara-bangsa lainnya (Navari, 2016). Seluruh negara berdaulat selalu terlibat aktif dalam proses memenuhi atau mengamankan tujuan dari kepentingan nasional mereka. Kebijakan luar negeri masing-masing negara mencerminkan kepentingan nasionalnya dan selalu berusaha untuk mengawal tujuannya. Dalam Hubungan Internasional, perjanjian dan kebijakan yang dirumuskan sebagai bentuk kerja sama antara negara-negara yang mencakup latar belakang kepentingannya masing-masing. Ambisi negara berdaulat untuk melindungi keamanan negara, termasuk keamanan maritim dapat diwujudkan dengan meningkatkan kekuatan negaranya melalui upaya sendiri, aliansi dan keberpihakan dengan negara lain.

Kerja Sama Keamanan

Kemampuan yang dimiliki negara menjadi bahan pertimbangan pentingnya untuk menjaga keamanan nasional. Kerja sama dan aliansi merupakan bentuk fragmentasi dari politik dan konflik untuk memenuhi kepentingan pihak yang terkait. Perangkat ini sebagian besar digunakan untuk

mengamankan kepentingan yang identik dan saling melengkapi. Kerja sama merupakan bentuk nyata dalam hubungan yang dilakukan oleh negara berdaulat guna untuk memenuhi kebutuhan domestik dan tujuan nasional sebuah negara yang tercermin dalam pengambilan kebijakan luar negeri oleh negara.

Meski bagaimanapun, penting bagi sebuah negara untuk mempertahankan teritori dan kedaulatan negaranya. Negara dengan kekuatan yang dominan atau negara *superpower*, akan berusaha untuk merespon seluruh isu yang terjadi demi mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan segala instrumen, termasuk kebijakan luar negeri. Kurangnya kedaulatan internasional karena keberadaan sistem anarki tidak hanya memungkinkan terjadinya perang antar negara, tetapi juga mempersulit negara-negara untuk puas dengan *status quo* demi mencapai tujuan yang mereka akui sebagai kepentingan bersama (Jervis, 1978).

Bantuan Keamanan

Meskipun tidak identik, kerja sama antar negara juga dapat tercermin dari bantuan asing. Tidak menutup kemungkinan bahwa kerja sama mungkin merupakan hasil dari hubungan antara aktor yang lebih kuat dan pihak yang lebih lemah (Dougherty & Pfaltzgraff, 2000). Konsep bantuan keamanan digunakan oleh penulis untuk menjelaskan pola interaksi yang dilakukan oleh *great powers* dan *small powers* dalam rangka mewujudkan kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, konsep ini penting digunakan untuk melihat kepentingan yang menggerakkan pemberian bantuan tersebut.

Keamanan Maritim dalam Perspektif Nasional

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya adalah negara dapat melindungi diri dan mencegah terjadinya ancaman yang

akan datang. Menjaga keamanan nasional, yang tercermin juga teritori negara berdaulat, merupakan bentuk konkrit dari sebuah negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Teritori dari sebuah negara berdaulat mencakup darat, laut dan udara.

Kebutuhan setiap negara untuk menjaga kepentingan nasionalnya itulah yang sering menjadi akar dari konflik-konflik yang terjadi di antara satu dengan yang lain. Meski demikian, belum ada definisi konkrit yang dapat menjelaskan mengenai konsep keamanan maritim. Fakta tersebut juga diakui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa yang menyatakan bahwa transportasi maritim merupakan ‘tulang punggung’ dari perdagangan dunia (United Nations, 2016). Bukan menjadi sebuah keunikan jika keamanan maritim, terutama bagi negara yang memiliki wilayah perairan yang luas, menjadi isu penting yang menyinggung mengenai keamanan serta kepentingan nasional.

Keamanan Maritim dalam Perspektif Global

Dimensi kelautan dan keamanan maritim menjadi isu yang penting bagi negara yang memiliki wilayah perairan yang luas. Sejak tahun 1948, negara-negara di dunia memiliki kesadaran untuk mengukuhkan kerja sama maritim sebagai konsekuensi dari terjadinya globalisasi dengan *membentuk Inter-Governmental Maritime Consultative Organization* (IMCO) atau yang saat ini lebih dikenal sebagai *International Maritime Organization* (IMO) (International Maritime Organization, Brief History of IMO). Namun, konvensi ini terbatas untuk hanya membahas mengenai isu kemaritiman terkait dengan pelayaran. Seiring berjalannya waktu, negara-negara sepakat untuk mengukuhkan batas-batas teritorial negaranya masing-masing. Perspektif global mengenai batas-batas wilayah perairan yang telah disetujui adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau *United Nation Convention on the Law of the*

Sea (UNCLOS) yang disahkan pada tahun 1982.

Luasnya wilayah perairan menimbulkan permasalahan bagi negara-negara yang berdaulat. Terutama karena ada banyak wilayah perairan yang bukan merupakan teritori dan kewenangan sebuah negara. Isu-isu untuk menjaga keamanan yang terjadi di dunia biasanya diawali oleh rasa terancam ataupun takut akan peristiwa buruk yang telah terjadi. Perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, terorisme, perdagangan manusia, penyelundupan obat-obatan terlarang atau narkoba, penyelundupan senjata, kecelakaan kerusakan ekosistem laut, bencana alam dan berbagai kegiatan ilegal dapat terjadi di lautan bebas tanpa adanya pengawasan merupakan contoh yang membuat isu kemaritiman masuk ke dalam lingkup *high politics*. Perspektif global dalam memandang keamanan maritim dapat dikatakan memiliki kecenderungan tidak kaku karena beberapa isu dapat dikategorikan sebagai isu keamanan non-tradisional. Meski demikian, tidak berarti bahwa keterlibatan militer dalam penanganan ancaman menjadi hal yang disepelekan dalam isu ini (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional, 2016).

Keamanan Maritim dalam Kepentingan Nasional Indonesia

Indonesia merupakan negara yang didominasi oleh wilayah perairan yang sangat luas. Sejak zaman kerajaan Sriwijaya, jaringan transportasi dagang, jaringan komoditas dan jaringan pelabuhan dikuasai dan melewati Selat Malaka yang merupakan bagian dari teritori wilayah Indonesia. Hingga saat ini, Selat Malaka merupakan jalur perdagangan dunia tersibuk yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudera Hindia. Sektor kemaritiman Indonesia memang bukan menjadi hal yang baru bagi kalangan negara-negara yang menjalin hubungan dekat dengan Indonesia. Potensi dan lokasi strategis yang dimiliki Indonesia memberikan keunggulan dalam posisi geopolitik dalam sistem

internasional. Oleh karena itu, isu keamanan maritim sebagai isu krusial yang dapat mengoptimalkan kapabilitas yang dimiliki oleh Indonesia.

Sektor kemaritiman sendiri sudah menjadi fokus penting bagi Indonesia. Terbukti sejak dibentuknya Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat (Tim Grasindo, 2017). Di Indonesia, serangan terhadap kapal dagang masih sering terjadi. Sejak tahun 2001-2010, hampir 25% dari kasus pembajakan dunia terjadi di wilayah perairan Indonesia (Twyman-Ghoshal & Pierce, 2014).

Berbagai kerja sama antar negara, baik secara multilateral maupun bilateral, dilakukan untuk menjaga keamanan. Salah satu negara mitra Indonesia dalam kerja sama adalah Amerika Serikat. Kerja sama tersebut tak luput dari sektor keamanan kemaritiman Indonesia. Kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang keamanan sudah dimulai sejak tahun 2002 yang dikenal dengan nama *Indonesia-United States Security Dialog* (IUSSD) (Embassy of Indonesia Washington, DC. *Bilateral Relation*, 2017). Dalam dialog tersebut, isu kemaritiman juga disinggung sebagai salah satu topik yang dibicarakan. Meski selama periode kedua SBY tidak banyak menyinggung mengenai aspek-aspek ketahanan maritim, diujung masa kepemimpinannya sebagai presiden Republik Indonesia ia mengesahkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 17 Oktober 2014 (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan). Undang-undang ini menyatakan secara spesifik mengenai isu kelautan serta berbagai sektor keamanan maritim.

Seperti berkesinambungan, pada masa awal jabatan Joko Widodo, dalam pidatonya di

KTT Asia Timur, ia mengenalkan visi misi Poros Maritim Dunia atau yang sering disebut sebagai *Global Maritime Fulcrum*. Dalam pidatonya, ia menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudra, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa (Tempo.co, 2014). Beberapa kerangka pemerintahan dalam sektor kelautan juga ikut dibentuk oleh kabinet kerja Joko Widodo sebagai sarana penunjang untuk mewujudkan arah kebijakan luar negeri tersebut. Terlebih lagi, visi misi ini merupakan respon dari isu kemaritiman yang sedang bergejolak di kawasan Asia Tenggara, yaitu isu Laut Cina Selatan.

Keuntungan Amerika Serikat dalam Memberikan Bantuan Terhadap Keamanan Maritim

Teori *neoclassical-realis* mengakui keberadaan struktur anarki dalam sistem internasional. Sampai saat ini negara Amerika Serikat masih memegang peranan sebagai negara adikuasa yang memiliki pengaruh dominan dalam skala global. Seluruh sektor dan peristiwa yang terjadi di dunia memiliki pengaruh terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Amerika Serikat, termasuk sektor kemaritiman. Pasalnya, dalam memberikan bantuan dan kerja sama seperti yang telah disinggung sebelumnya, negara adikuasa tersebut memiliki faktor penggerak yaitu kepentingan negara. Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan mengenai kepentingan Amerika Serikat dalam memberikan bantuan keamanan maritim.

Keuntungan Global Amerika Serikat Memberikan Bantuan Maritim

Seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, isu keamanan maritim global dapat menjadi peluang kerja sama bagi negara yang memiliki kapabilitas yang tinggi. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memiliki kesadaran dan mekanisme kerja

sama yang dapat digunakan demi memenuhi kepentingan nasionalnya. Akses, efek *deterrence* dan kontrol merupakan kepentingan utama AS dalam memberikan bantuan maritim.

Dari segi kawasan. Pada tanggal 21 Desember 2004, Presiden Bush mengesahkan *National Security Presidential Directive 41/Homeland Security Presidential Directive 13* (NSPD-41/HSPD-13) mengenai kebijakan keamanan Maritim yang menggarisbawahi pentingnya mengamankan wilayah maritim untuk kepentingan nasional Amerika Serikat (National Maritime Intelligence-Integration

Office, 2005). Amerika Serikat merupakan negara dengan pasar yang aktif melakukan ekspor dan impor. Pada tahun 2017 kategori ekspor, Amerika Serikat menduduki peringkat ketiga dalam perdagangan internasional dengan total \$1.25 triliun (Simoes, AJG & CA Hidalgo). Sedangkan dalam kategori impor, Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan total \$2.16 triliun (Simoes, AJG & CA Hidalgo). Berikut adalah enam belas mitra dagang utama Amerika Serikat berdasarkan kegiatan ekspor dan impor pada tahun 2017:

Tabel 4.1 Perdagangan Barang Amerika Serikat dengan Mitra Dagang Utama

Mitra Dagang	Total Perdagangan	Ekspor		Impor		Neraca Perdagangan	
	2017	2017	% Perubahan 2017/16	2017	% Perubahan 2017/16	2017	% Perubahan 2017/16
Dunia	3,914.3	1,553.4	6.62	2,360.9	6.92	-807.5	7.52
Uni Eropa	722.2	284.8	5.11	437.4	4.37	-152.6	3.01
Tiongkok	636.7	130.4	12.45	506.3	9.30	-375.9	8.25
Kanada	588.4	282.9	5.85	305.5	7.73	-22.7	38.46
Meksiko	563.8	243.8	5.85	320.0	6.55	-76.1	8.86
Jepang	206.6	68.3	7.10	138.3	3.06	-70.0	-0.60
Jerman	171.8	53.9	9.09	118.0	2.94	-64.1	-1.72
Korea Selatan	121.1	49.3	14.65	71.8	2.05	-22.6	-17.69
Inggris	110.3	56.6	1.94	53.7	-2.28	2.9	427.29
Perancis	83.0	33.7	7.77	49.3	4.70	-15.5	-1.40
India	74.4	25.7	18.65	48.7	5.59	-23.0	-6.00
Taiwan	68.8	26.3	-0.88	42.5	8.31	-16.2	27.56
Italia	68.6	18.5	10.19	50.1	10	22	-31.7
Brazil	64.9	37.1	23.48	27.8	12.93	9.3	71.66
Singapura	48.8	29.5	11.37	19.3	8.65	10.1	16.93
Hong Kong	48.5	40.7	14.54	7.8	-0.06	32.9	18.65
Arab Saudi	35.2	16.3	-9.67	19.0	11.57	-2.7	-362.01

Sumber: "U.S. Trade with Major Trading Partners." *Congressional Research Service*. (2018). <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R4543>. Diolah oleh penulis.

Dikutip dari dokumen Departemen Keamanan Amerika Serikat, mereka menyatakan bahwa:

Kemaritiman Asia adalah jalur vital bagi perdagangan global, dan itu akan menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi yang diharapkan di kawasan itu. Amerika Serikat ingin memastikan kelanjutan kemajuan ekonomi kawasan Asia-Pasifik. Pentingnya jalur laut Asia-Pasifik untuk perdagangan global tidak dapat dilebih-lebihkan. Delapan dari 10 pelabuhan peti kemas tersibuk di dunia berada di kawasan Asia-Pasifik, dan hampir 30 persen dari perdagangan maritim dunia melintasi Laut Cina Selatan setiap tahun, termasuk sekitar \$ 1,2 triliun dalam perdagangan kapal-ditanggung yang terikat untuk Amerika Serikat.

Bersamaan dengan kebangkitan kekuatan ekonomi negara, penetapan jalur sutra *One Belt One Road* (OBOR) oleh Republik Rakyat Tiongkok menjadi penanda kebangkitan kekuatan maritim. Salah satu kawasan yang dijadikan rute perdagangan melalui jalur perairan OBOR adalah kawasan Asia Tenggara. Meski proyek ini masih belum terealisasi, kehadiran Republik Rakyat Tiongkok dalam jalur pelayaran dapat menjadi ancaman bagi Amerika Serikat dalam sektor kemaritiman.

Kepentingan Amerika Serikat Bekerja Sama dalam Sektor Maritim dengan Indonesia

Kepentingan Amerika Serikat tercermin dari kebijakan yang diambil dalam membangun relasi dengan negara strategis. Hubungan diplomatik Amerika Serikat-Indonesia secara resmi pada 28 Desember 1949 dan sudah mengalami berbagai macam pasang-surut (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Indonesia dan Amerika*

Serikat Sambut Perayaan 70 Tahun Hubungan Bilateral, 2019). Amerika Serikat melihat Indonesia merupakan negara yang memiliki kesamaan nilai-nilai dan kepentingan strategis (U.S Embassy & Consultant in Indonesia. *Fact Sheet: U.S. Building Maritime Capacity in Southeast Asia.*). Pada tahun 2002, Indonesia dan Amerika Serikat juga telah menyelenggarakan pertemuan militer tahunan melalui *Indonesia-United States Security Dialog* (IUSSD). Dalam dialog ini, pejabat tinggi militer kedua negara meninjau kerja sama bilateral mereka, serta bertukar pandangan mereka tentang masalah keamanan regional dan global (Embassy of The Republic of Indonesia in Washington D.C. The United States of America. "Indonesia - US Relations.", 2018). *Safe passage* untuk jalur perdagangan merupakan salah satu kepentingan Amerika Serikat di Indonesia.

Perubahan arah kebijakan luar negeri Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia juga membuat ketertarikan tersendiri bagi Republik Rakyat Tiongkok. Presiden Joko Widodo di tahun pertamanya menjabat sebagai presiden Republik Indonesia mengunjungi Beijing pada bulan Mei 2015. Kedatangan tersebut disambut baik oleh Presiden Xi Jinping dengan menetapkan “Kemitraan Maritim” Tiongkok-Indonesia. Republik Rakyat Tiongkok berjanji akan menggunakan Bank Investasi Infrastruktur Asia dan dana Jalan Sutra untuk mempercepat pembangunan infrastruktur maritim Indonesia dengan membangun pelabuhan dan kereta api dan mendorong sektor pembuatan kapal (Quirk, Sean, & John Bradford, 2015). Melihat sikap tersebut, hegemoni Amerika Serikat di wilayah perairan Indonesia mulai terancam akan tergantikan. Posisi *balance of power* dan akses terhadap jalur perdagangan dalam kawasan Asia Tenggara yang dianggap *win-win solution* akan mengalami perubahan jika negara Amerika Serikat tidak dapat merespon dengan cepat.

Pada tanggal 24 Oktober 2015, Amerika Serikat dan Indonesia menandatangani nota kesepahaman mengenai kemaritiman. Amerika Serikat mempertimbangkan kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu Poros Maritim Dunia, yang cenderung mengutamakan kepentingan domestik. Oleh karena itu, Amerika Serikat mengadopsi kepentingan tersebut dan merumuskan ke dalam kerja sama kebijakan keamanan maritim yang lebih kompleks. Pentingnya menjalin kerja sama dengan Indonesia juga disampaikan oleh mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis:

Amerika Serikat ingin bekerja dengan Indonesia, sebagai titik tumpu maritim Indo-Pasifik, untuk memastikan bahwa aturan hukum dan kebebasan navigasi ditegakkan di kawasan ini (Chan, Francis, 2018).

Pertimbangan Indonesia dalam Menjalinkan Kerja Sama Bilateral dengan Amerika Serikat pada Sektor Keamanan Maritim

Isu keamanan biasanya muncul akibat adanya ancaman atau potensi ancaman yang dapat terjadi dikemudian hari. Sebagaimana tercantum dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008, stabilitas keamanan merupakan bagian dari kepentingan nasional Indonesia (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional, 2016). Keamanan maritim merupakan isu yang sangat penting bagi negara yang didominasi wilayah perairan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mencermati dinamika keamanan dalam berbagai dimensi agar dapat mengidentifikasi prioritas keamanan dan mengambil strategi yang tepat. Kerja sama bilateral pada sektor keamanan maritim melibatkan dua negara yang haruslah memiliki kesamaan kepentingan dan kesetaraan.

Perspektif Domestik

Berdasarkan penjabaran diatas, keamanan maritim dianggap sebagai kepentingan nasional Indonesia. Mengingat wilayah teritorial Indonesia didominasi perairan, Indonesia memiliki kekayaan bahari dan sumber daya kelautan yang sangat kaya. Secara garis besar, kejahatan terorganisir lintas batas yang terjadi di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

- (i) kejahatan yang memanfaatkan laut sebagai objek (IUU *fishing*, *illegal waste dumping*, dan *illegal poaching*);
- dan (ii) kejahatan laut yang memanfaatkan laut sebagai sarana (seperti penyelundupan manusia dan perdagangan orang serta pembajakan dan perampokan bersenjata di laut) (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional, 2016).

Tindakan dan ancaman kejahatan yang merajalela di laut akan berdampak negatif pada aliran perdagangan nasional dan internasional yang melewati wilayah laut Indonesia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Selat Malaka merupakan selat tersibuk dalam lalu lintas perdagangan antar negara. Selat tersebut terletak di dalam wilayah teritori negara Indonesia merupakan akses dari dan ke pasar domestik, serta jalur perdagangan dunia. Oleh karena itu, segala bentuk ancaman seperti kekerasan, terorisme, pelanggaran hukum, eksploitasi ilegal sumber daya alam dan pencemaran lingkungan, navigasi merupakan faktor penting dalam pertimbangan Indonesia memilih negara mitra.

Dalam acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI pada tahun 2015, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa dalam lima tahun ke depan, diplomasi Indonesia akan dilakukan untuk melindungi kedaulatan wilayah Negara Republik Indonesia (Kompas Gramedia Digital Group. *Menlu: Diplomasi untuk Lindungi Kedaulatan Wilayah Indonesia*, 2015). Pada praktiknya, kerja sama tersebut

diwadahi dengan agenda diplomasi maritim yang menjadi Renstra (Rencana Strategis) dalam ranah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Nazaruddin, 2019). Agenda pertama dalam menjalin kerja sama internasional, Indonesia harus melihat dari perspektif ekonomi, keamanan maupun kedaulatan. Dari segi ekonomi, Indonesia memerlukan bantuan dana untuk membangun infrastruktur yang dapat menunjang keamanan maritim domestik. Sedangkan dari sisi keamanan dan kedaulatan, Indonesia memerlukan bantuan untuk melakukan patroli bersama serta memerlukan sumber daya atau *training* untuk penguatan perbatasan.

Indonesia juga melihat peluang yang diperoleh dari kerja sama tersebut. Pada umumnya, negara maju seperti Amerika Serikat akan memberikan bantuan dalam bentuk *capacity building*, *training of trainers* (ToT), transfer teknologi beserta fasilitas pengajaran. Selain itu, negara maju juga memberikan bantuan dalam bentuk *institutional capacity* (Nazaruddin, 2019). Bantuan ini dimaksudkan untuk mendukung negara penerima membentuk payung hukum yang dapat memberantas permasalahan keamanan seperti kelautan. Negara maju juga cenderung memperkuat pemerintahan negara yang menerima dan memberikan bantuan dalam bentuk sumber daya manusia.

Perspektif Internasional

Kerja sama maritim antara Amerika Serikat tidak terbatas terhadap perspektif domestik. Namun, peluang kerja sama ini bisa mencakup ke ranah internasional. Dengan prinsip kebijakan ‘bebas dan aktif’, Indonesia tidak boleh menunjukkan keberpihakan dalam memilih mitra strategis. Namun, bebas dan aktif itu sendiri bukan berarti Indonesia serta merta melakukan kerja sama dengan negara lain. Hal ini dikarenakan, Indonesia percaya bahwa kesamaan kepentingan atau *aligned interest* merupakan kunci penting dalam pembuatan kerja sama.

Selain itu, posisi politik Indonesia juga dalam sektor keamanan maritim semakin dikukuhkan karena baik Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok berlomba-lomba membuat kerja sama dengan negara Indonesia. Sama halnya dengan perspektif domestik yang merupakan kepentingan Indonesia, isu IUU Fishing yang belum dianggap sebagai masalah kejahatan maritim oleh dunia internasional dapat bergeser menjadi isu yang dianggap penting karena adanya pengakuan dari Amerika Serikat. Dengan pengakuan tersebut, besar kemungkinan bahwa isu IUU Fishing akan diangkat menjadi norma internasional yang akan membantu Indonesia dalam memberantas tindakan yang merugikan kepentingan nasional. Jika hal tersebut dapat menjadi norma dalam internasional, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa harus menerima konsekuensi dan Indonesia dapat lebih mudah untuk menegakkan hukum.

Peluang kerja sama Amerika Serikat dan Indonesia juga dapat membantu sektor perdagangan lintas negara adalah pemenuhan regulasi mengenai sektor pelabuhan atau yang disebut sebagai *The New International Ship and Port Facility Security* (ISPS Code) (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional, 2016). Pemenuhan syarat dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk lebih menggabungkan sektor arus lalu lintas perdagangan, terlebih jika negara Indonesia benar-benar menginginkan posisi sebagai poros dalam kemaritiman dunia. Kerja sama ini juga mencerminkan kontribusi Indonesia dalam sektor perdagangan dunia yang mengharuskan pemenuhan regulasi yang telah diterapkan oleh IMO.

Peran Amerika Serikat dalam Membangun Keamanan Maritim Indonesia

Kerja sama bilateral Amerika Serikat dan Indonesia dalam sektor kemaritiman sudah berlangsung lama dan mengalami dinamika perubahan. Kerja sama CARAT antara Amerika Serikat dan Indonesia sudah

terjadi sejak tahun 1995 melalui latihan gabungan (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018). Seiring meningkatnya kepentingan Amerika Serikat dalam kawasan Asia Tenggara, kerja sama bilateral dengan Indonesia dalam bidang kemaritiman juga ikut meningkat. mengenai kerja sama bilateral dalam sektor keamanan maritim yang dilakukan oleh Amerika Serikat-Indonesia dalam periode Era SBY II dan Joko Widodo I.

Era Susilo Bambang Yudhoyono II

Pada era SBY II, Amerika Serikat - Indonesia memiliki perjanjian yang dikenal

sebagai *Comprehensive Partnership Agreement*. Namun, perjanjian ini tidak mengandung pilar mengenai kerja sama dalam sektor maritim. Peran Amerika Serikat dalam sektor kemaritiman Indonesia pada era SBY 2, hanya mencakup *Cooperation Afloat Readiness and Training* atau CARAT, transfer teknologi (seperti satelit dan sistem terintegrasi), dan rapat perencanaan kegiatan CARAT. Berikut merupakan tabel kerja sama maritim antara Amerika Serikat dan Indonesia yang telah dikelompokkan berdasarkan tahun pada era SBY II:

Tabel 4.2 Rangkuman Kerja Sama Maritim Amerika Serikat-Indonesia di Era SBY II

Tahun	Kerja Sama	Highlight
2009	<ul style="list-style-type: none"> CARAT Indonesia 2009 	Pelatihan <i>Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR)</i> .
2010	<ul style="list-style-type: none"> CARAT Indonesia 2010 Nota kesepahaman NOAA 	<i>Military Operations in Urban Terrain (MOUT)</i>
2011	<ul style="list-style-type: none"> CARAT Indonesia 2011 Penyerahan IMSS secara resmi 	-
2012	<ul style="list-style-type: none"> CARAT Indonesia 2012 	-
2013	<ul style="list-style-type: none"> CARAT Indonesia 2013 Rapat Awal IPC 	-
2014	<ul style="list-style-type: none"> CARAT Indonesia 2014 	Latihan penyelaman

Sumber: Diolah oleh penulis.

Era Joko Widodo I

Melanjutkan kursi kepresidenan yang telah dilepaskan oleh SBY, Presiden Joko Widodo dilantik pada tanggal 19 Oktober 2014. Setelah adanya kebijakan Poros Maritim Dunia, Amerika Serikat - Indonesia menandatangani *Strategic Partnership Agreement* yang mengandung Nota

Kesepahaman dalam sektor maritim. Peran Amerika Serikat pada era Joko Widodo I mencakup CARAT, nota kesepahaman maritim, Bakamla RI-USCG, Dialog Hukum Kemaritiman, Pembahasan Isu Strategis, serta sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berikut merupakan tabel kerja

sama maritim antara Amerika Serikat dan Indonesia yang telah dikelompokkan berdasarkan tahun pada era Joko Widodo I

Tabel 4.3 Rangkuman Kerja Sama Maritim Amerika Serikat-Indonesia di Era Joko Widodo I

Tahun	Kegiatan	Highlight
2014	(dikosongkan karena kegiatan masuk ke periode SBY II)	<i>Global Maritime Fulcrum</i> atau Poros Maritim Dunia
2015	<ul style="list-style-type: none"> ● CARAT Indonesia 2015 ● <i>Strategic Partnership</i> ● Nota Kesepahaman Kerja Sama Maritim 	VBSS
2016	<ul style="list-style-type: none"> ● CARAT Indonesia 2016 ● Kerja sama IPTEK ● <i>1st United States Oceans Law and Maritime Policy Dialogue</i> 	-
2017	<ul style="list-style-type: none"> ● CARAT Indonesia 2017 ● Penandatanganan Rencana Kerja Bakamla-RI dan USCG 	CENTRIXS
2018	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembahasan isu strategis ● <i>2nd United States Oceans Law and Maritime Policy Dialogue</i> ● Kunjungan USCG ● Nota kesepahaman Bakamla-RI dan USCG ● CARAT Indonesia 2018 	CENTRIXS dan SeaVision
2019	<ul style="list-style-type: none"> ● CARAT Indonesia 2019 ● Pertemuan Bakamla RI-USCG ● Latihan perdana Bakamla RI-USCG 	<i>Capacity building</i> , berbagi informasi, dan komunikasi antar penjaga pantai

Sumber: Diolah oleh penulis.

Berdasarkan dua kurun waktu pemerintahan yang telah dijabarkan oleh penulis, terlihat

adanya peningkatan peran Amerika Serikat dalam sektor keamanan maritim Indonesia

Tabel 4.4 Hasil Peningkatan Kerja Sama Bilateral Amerika Serikat-Indonesia Tahun 2009-2019

No.	Kerja Sama	SBY II	Joko Widodo I
-----	------------	--------	---------------

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	CARAT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Transfer Teknologi	-	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-
3.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
4.	Nota Kesepahaman Maritim	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
5.	Dialog Hukum Kemaritiman	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
6.	Bakamla RI-USCG	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓

Sumber: Diolah oleh penulis.

Konsep keamanan maritim yang masih luas menyebabkan bantuan yang diberikan tidak hanya pelatihan militer yang identik dengan masalah keamanan dan kedaulatan sebuah negara.

Dari segi perjanjian bilateral, Kemitraan Komprehensif Amerika Serikat-Indonesia pada 2010 tidak membahas secara spesifik mengenai sektor kemaritiman dan tidak adanya nota kesepahaman maritim di antara kedua belah pihak. Berbeda dengan Kemitraan Strategis Amerika Serikat-Indonesia yang dibuat pada tahun 2015, adanya nota kesepahaman maritim menjadi penanda keseriusan kedua belah pihak pada sektor maritim. Peningkatan peran Amerika Serikat dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia terasa cukup signifikan. Seperti yang sudah diketahui bahwa tujuan

pembentukan TNI adalah untuk menjaga kedaulatan sebuah negara. Sedangkan kedaulatan sebuah negara dapat dicapai jika keamanan berhasil ditegakan.

Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman maritim, Amerika Serikat juga aktif untuk mengajak Bakamla-RI untuk terlibat keamanan maritim Indonesia. Keterlibatan Amerika Serikat dalam periode Presiden Joko Widodo (I) merambat juga ke dalam dialog pembangunan dalam rangka memperkuat sektor kemaritiman Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa Amerika Serikat mengadopsi kepentingan nasional Indonesia dan merumuskannya ke dalam perjanjian. Harus diakui juga bahwa adanya kemungkinan peningkatan kerja sama Amerika Serikat-Indonesia menjadi bukti adanya upaya Amerika Serikat untuk menerapkan *balance of*

power terhadap kerja sama Indonesia-Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini menjadi indikasi bahwa kerja sama juga dijadikan alat dan sarana pemenuhan kepentingan nasional Amerika Serikat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa peningkatan Peran Amerika Serikat dalam Memperkuat Keamanan Maritim Indonesia tahun 2009-2019 dilandasi oleh kepentingan masing-masing negara terkait. Pergantian arah kebijakan luar negeri Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia juga terbukti membawa perubahan terhadap bentuk dan jumlah kerja sama maritim antara Amerika Serikat dan Indonesia ke tahap yang lebih maju. Kerja sama antara Amerika Serikat dan Indonesia mengalami peningkatan dari berbagai sektor. Hal ini terbukti dengan adanya penambahan jumlah kerja sama di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (I) jika dibandingkan dengan masa Presiden SBY (II). Adanya nota kesepahaman maritim juga membuat kerja sama Amerika Serikat dan Indonesia lebih terstruktur dan menguntungkan kedua belah pihak.

Posisi strategis Indonesia merupakan salah satu pertimbangan yang mendorong Amerika Serikat dalam menjalin kerja sama dengan Indonesia. Amerika Serikat menganggap penting sektor kemaritiman Asia dianggap sebagai jalur vital bagi perdagangan global, dan akan menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi. Kerja sama antara Republik Rakyat Tiongkok dan Indonesia juga membuat hegemoni Amerika Serikat terancam dapat tergantikan. Posisi *balance of power* dan akses terhadap jalur perdagangan dalam kawasan Asia Tenggara dianggap sebagai solusi terbaik bagi kepentingan Amerika Serikat.

References

- Babbie, E. (2012). *The basics of social research*. Toronto, Canada: Wadsworth Co Inc.
- Biro Komunikasi dan Informasi Publik Departemen Perhubungan. (2018). *Empat puluh persen jalur perdagangan dunia melewati Indonesia*. Retrieved from <http://dephub.go.id/post/read/empat-puluh-persen-jalur-perdagangan-dunia-melewati-indonesia>
- Bradford, J. F. (2011). The maritime strategy of the United States: Implications for Indo-Pacific sea lanes. *Contemporary Southeast Asia*, 33(2), 183. <https://doi.org/10.1355/cs33-2b>
- Chan, F. (2018, January 23). US to work with Indonesia on maritime security, counter-terrorism. Retrieved from <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/us-to-work-with-indonesia-on-maritime-security-counter-terrorism>
- Dharma, S. (2008). *Pendekatan, jenis, dan metode penelitian pendidikan*. Jakarta, Indonesia: Departemen Pendidikan Nasional.
- Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff, R. L. (2000) *Contending theories of international relations: A comprehensive survey* (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Embassy of The Republic of Indonesia. (2017). *Bilateral relations*. Retrieved from <https://www.embassyofindonesia.org/index.php/bilateral-relations/>
- Embassy of The Republic of Indonesia. (2018). *Indonesia - US relations*. https://kemlu.go.id/washington/en/pages/hubungan_bilateral/554/etc-menu
- Fitriani, E. (2017). The Trump presidency and Indonesia: Challenges and opportunities. *Contemporary Southeast Asia*, 39 (1), 58-64.
- Gerke, S., & Evers, H. (2011). Selat Malaka: Jalur sempit perdagangan dunia. *Akademika*, 81(1), 5-14.
- Graham, E. (2013). Southeast Asia in the US rebalance: Perceptions from a divided region. *Contemporary Southeast Asia*, 35(3), 305. <https://doi.org/10.1355/cs35-3a>
- Henn, M., Weinstein, M., & Foard, N. (2006). *A short introduction to social research*. New Delhi, India: Sage Publications.
- Hutchings, K. (1991). *International political theory*. London, UK: Sage Publications.
- International Maritime Organization. (N.d.). *Brief history of IMO*. Retrieved from <http://www.imo.org/en/About/HistoryOfIMO/Pages/Default.aspx>
- Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. *World Politics*, 30(2), 167–214. <https://doi.org/10.2307/2009958>
- Kolodziej, E. A. (2005). *Security and international relations*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511614903>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2017, September 1). *Maritim Indonesia, kemewahan yang luar biasa*. Retrieved from <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Indonesia dan Amerika Serikat sambut perayaan 70 tahun hubungan bilateral*. Retrieved from <https://kemlu.go.id/portal/id/read/173/berita/indonesia-dan-amerika-serikat-sambut-perayaan-70-tahun-hubungan-bilateral>
- Kompas Gramedia Digital Group. (2015, January 8). *Menlu: diplomasi untukindungi kedaulatan wilayah Indonesia*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/08/16165451/Menlu.Diplomasi.untuk.Lindungi.Kedaulatan.Wilayah.Indonesia>.

- Limaye, S. P. (2013). Southeast Asia in America's rebalance to the Asia-Pacific. *Southeast Asian Affairs 2013*, 40–50. <https://doi.org/10.1355/9789814459563-006>
- Lundborg, T. (2019). The ethics of neorealism: Waltz and the time of international life, *European Journal of International Relations* 25(1), 229–249. <https://doi.org/10.1177/1354066118760990>
- Murphy, A. M. (2010). US rapprochement with Indonesia: From problem State to partner. *Contemporary Southeast Asia*, 32(3), 362–387. <https://doi.org/10.1355/cs32-3c>
- Nazaruddin, W. F., Kepala Sub Bidang Kajian Penanggulangan Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara, Pusat Pengkajian Multilateral, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Wawancara oleh penulis, 13 November 2019, Jakarta. Perekam suara. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- National Maritime Intelligence-Integration Office. (2005). *National strategy for maritime security: global maritime intelligence integration plan*.
- Navari, C. (2016). Hans Morgenthau and the national interest. *Ethics & International Affairs*, 30(1), 47–54. <https://doi.org/10.1017/s089267941500060x>
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Harlow, UK: Pearson Education Limited.
- Nguyen, P. (2016). Deciphering the shift in America's South China Sea policy. *Contemporary Southeast Asia*, 38(3), 389–421. <https://doi.org/10.1355/cs38-3b>
- Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. (2018). *Info Singkat Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) dan Kemitraan Maritim Amerika Serikat-Indonesia.X(16)/II/Puslit/Agustus/2018, 7-12*.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional. (2016). *Diplomasi Poros Maritim; Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri*. Jakarta Pusat: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Quirk, S., & Bradford, J. (2015, October 27). The 'Global Maritime Fulcrum' and the US-Indonesia partnership. Retrieved from <https://thediplomat.com/2015/10/how-the-global-maritime-fulcrum-can-elevate-the-us-indonesia-partnership/>
- Quirk, S., & Bradford, J. (2015). Maritime Fulcrum: A new U.S. opportunity to engage Indonesia. *Issue & Insights*, 1-11.
- Scobell, A. (2018). The South China Sea and U.S.- China rivalry. *Political Science Quarterly*, 133(2), 199-226. <https://doi.org/10.1002/polq.12772>
- Simoës, A. J. G., & Hidalgo, C.A. (N.d.) United States (USA) exports, imports, and trade partners. The Economic Complexity Observatory: An Analytical Tool for Understanding the Dynamics of Economic Development. Retrieved from <https://oec.world/en/profile/country/usa/>
- Simon, S. W. (2015). The US rebalance and Southeast Asia. *Asian Survey*, 572-595.
- Person. (2014, November 13). *Jokowi yakin Indonesia jadi poros maritim dunia*. Retrieved from <https://dunia.tempo.co/read/621693/jokowi-yakinindonesiadiporosmaritimdunia/full&view=ok>
- Thayer, C. A. (2011). The United States, China and Southeast Asia. *Southeast Asian Affairs*, 16-25. <https://doi.org/10.1355/9789814345040-004>
- Tim, G. (2017). *UUD 1945 & amandemennya untuk pelajar dan umum*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tow, W. T. (2016). U.S.–Southeast Asia relations in the age of the rebalance. *Southeast Asian Affairs 2016*, 35–54. <https://doi.org/10.1355/9789814695671-006>